

## EFEKTIVITAS DAN KESesuaIAN PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PSAP NO.02 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BOGOR

Ashifa Wahdania<sup>1</sup>, Kamilah Sa'diah<sup>2</sup>

Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia, Bogor

sadiahkamila@gmail.com

### ABSTRACT

*Government agencies are generally formed to carry out service activities for the wider community and as non-profit organizations or non-profit organizations that have the aim of providing services and capabilities. This study aims to determine the results of the review. The effectiveness and suitability of the presentation of PSAP No. 02 of the 2019 Budget Realization Report of the Bogor City Food and Agriculture Security Service. This research is a descriptive type with a qualitative analysis approach. The location and object of the research or used as a source of research information is the SKPD Budget Realization Report for the 2019 Fiscal Year. The data collection method uses library research, documentation, and observation techniques. The conclusions of this study are: (1) The Budget Realization Report at the Bogor City Food and Agriculture Security Service is considered to have been in accordance with PSAP No. 02 concerning the Budget Realization Report which is prepared using a cash basis. (2) The realized income in the Budget Realization Report is 106.86%, it can be said to be very effective because the realization of income exceeds the predetermined budget. Spending can also be said to be effective because it does not exceed the budget limit that has been set, which is 95.55%. (3) The difference in the presentation of the Budget Realization Report presented by PSAP No. 02 with the Food and Agriculture Security Service is the absence of financing posts and SiLPA/SiKPA because there are no transactions related to these posts.*

**Keyword:** *Budget Realization Report, PSAP No.02*

### ABSTRAK

Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba atau organisasi non-profit yang mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil tinjauan. Efektivitas dan kesesuaian penyajian terhadap PSAP No.02 dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Lokasi dan objek dari penelitian atau dijadikan sumber informasi penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan. Simpulan penelitian ini yaitu: (1) Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor tersebut dinilai telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disusun menggunakan basis kas. (2) Pendapatan yang terealisasi pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar 106,86% hal tersebut dapat dikatakan sangat efektif karena realisasi pendapatan melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Belanja pun dapat dikatakan efektif karena tidak melebihi batas anggaran yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 95,55%. (3) Perbedaan yang terdapat dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan PSAP No.02 dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah tidak adanya pos pembiayaan dan SiLPA/SiKPA karena tidak adanya transaksi yang berkaitan dengan pos tersebut.

**Kata Kunci:** *Laporan Realisasi Anggaran, PSAP No.02*

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan, tugas dan fungsi untuk mengatur kepentingan dan mengelola suatu kebijakan guna mencapai tujuan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba atau organisasi non-profit yang mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan (Illahi & Alia, 2017). Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, seperti meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan ini juga mencakup kesepakatan bersama antara *agent* dan *principal* dalam suatu kontrak agensi, dimana pihak manajemen ditunjuk sebagai eksekutor yang dapat memilih pake kebijakan akuntansi untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Husain & Wahyudi, 2020).

Laporan keuangan daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan salah satunya oleh instansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah daerah yang akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan dan menilai kinerja Pemerintah Daerah. Peranan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP RI NO.24 TH.2005, 2007, hal. 28).

Menurut yang dikutip dari (RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, 2018), pendapatan dalam laporan realisasi anggaran merupakan penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja merupakan pengeluaran oleh entitas pemerintah yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan. Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain. Pembiayaan merupakan penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang suatu saat perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali. Biasanya pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus. Laporan Realisasi Anggaran memaparkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Standar laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian hanya membatasi pembahasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP No. 02 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hasil tinjauan dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor?
2. Bagaimana efektivitas Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor?
3. Apakah penyajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor?

## KAJIAN TEORI

### Konsep Akuntansi Sektor Publik

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), dalam (Darya, 2019) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "Akuntansi adalah seni dalam mengidentifikasi, merekam, mengklasifikasikan, dan meringkas secara signifikan dan yang berhubungan dengan uang, transaksi serta peristiwa yang ada, setidaknya bersifat finansial dan menafsirkan hasilnya." Akuntansi adalah sesuatu yang disusun untuk menghasilkan suatu laporan yang berguna untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Hariyani, 2018). Pemakai informasi dari pihak internal biasanya direktur dan manager keuangan, direktur operasional dan manager pemasaran, manager dan supervisor produksi. Sedangkan pemakai dari pihak eksternal seperti pemerintah, investor (penanam modal), kreditor dan lain-lain. Laporan keuangan akuntansi meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).



Gambar 1 Siklus Akuntansi (Bahri, 2020)

Akuntansi memiliki beberapa prinsip yaitu: (1) Kontinuitas usaha (*going concern*). Merupakan kelangsungan usaha, prinsip ini menganggap suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuiditas pada masa mendatang. (2) Kesatuan usaha (*business entity*), konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan dipandang sebagai satu unit yang berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya. (3) Periode akuntansi (*accounting periode*), merupakan suatu kegiatan usaha yang

disajikan dalam bentuk laporan keuangan disusun berdasarkan periode pelaporan. (4) Kesatuan pengukuran (*measurent unit*), konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang. (5) Bukti yang objektif (*objective evidences*), informasi yang disajikan harus bersifat objektif, yaitu dapat diandalkan dan informasi harus disajikan berdasarkan pada bukti yang ada. (6) Pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure*), konsep ini menganggap bahwa laporan keuangan harus disajikan dan diungkap secara memadai. (7) Konsistensi (*consistency*), konsep ini menuntut perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode lainnya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. (8) Realisasi (*matching expense with revenue*), prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba-rugi periode berjalan (Bahri, 2020).

Definisi akuntansi sektor publik menurut Bastian dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik* (Biduri, 2018) adalah sebagai berikut: "Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta". Menurut Abdul Hafiz, Akuntansi sektor publik merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta pengikhtisaran dengan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter, dan kejadian kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada asas otonomi serta tugas pembantuan yang didasarkan pada prinsip otonomi pada prinsip dan sistem NKRI (Setyawati & Ferdinand, 2019).

Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dan keuangan secara periodik biasanya dalam periode tahunan, biasanya berisi rencana, kegiatan dan pendapatan atau penerimaan serta pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut (Majid, 2019), anggaran sektor publik digunakan untuk membantu menentukan kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan dan sebagainya agar terjamin secara memadai. Anggaran sektor publik menjadi penting karena beberapa alasan yaitu: (1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menata pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. (2) Anggaran diperlukan karena adanya suatu kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak ada batasnya dan terus bertambah, sedangkan sumberdaya yang tersedia jumlahnya terbatas. Melihat masalah tersebut anggaran diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya. (3) Anggaran diperlukan untuk membuktikan bahwa pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan perangkat pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

### **Siklus Anggaran**

Menurut (Khusuma, 2017), siklus anggaran (*budget cycle*) organisasi nirlaba memungkinkan menyusun anggaran dengan tahapan-tahapan berikut:

#### **a. Tahap Persiapan (*Preparation*)**

Tahap persiapan meliputi pemberian arahan berdasarkan rencana strategis organisasi dan usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja/program. Di dalam tahap persiapan pimpinan organisasi memberikan arahan terkait kegiatan atau program yang akan dilakukan. Kemudian arahan tersebut ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan mengajukan desain serta estimasi biaya yang diperlukan. Selain itu juga dibutuhkan indikator pencapaian yang mana gunanya untuk mengevaluasi.

Dalam penyusunan anggaran diperlukan anggaran fleksibel, anggaran ini berguna untuk menyesuaikan perubahan volume aktivitas dengan jumlah yang sudah dianggarkan. Anggaran fleksibel bermanfaat untuk mengendalikan beban operasi serta biaya produksi.

#### **b. Tahap Ratifikasi (*Ratification*)**

Proses selanjutnya yaitu proses ratifikasi, maksudnya adalah proses pengumpulan seluruh usulan yang ada dan mendiskusikan bersama. Seluruh usulan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dalam proses penggabungan usulan tersebut diperlukan sinkronisasi agar program kegiatan dapat terjalin. Namun perlu di ingat dalam proses penggabungan dan sinkronisasi tersebut harus diperhitungkan kepentingan organisasi dan relitasnya dilapangan. Maka diperlukan skala prioritas program kerja.

#### **c. Tahap Implementasi (*Implementation*)**

Bagian terpenting dalam proses penyusunan anggaran adalah memprediksikan sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan atau program yang telah direncanakan. Untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi banyaknya anggaran penerimaan maka diperlukan pembuatan anggaran penerimaan dalam berbagai skenario. Setelah menentukan skenario yang digunakan diperlukan menentukan besaran biaya yang akan dianggarkan yakni dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dimaksud yaitu biaya yang harus terus menerus dianggarkan meskipun tidak adanya kegiatan. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang timbul sejalan dengan volume kegiatan yang direncanakan organisasi.

#### **d. Tahap Pelaporan (*Reporting*)**

Tahapan akhir yakni menyusun anggaran dengan menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri atas skenario yang tersedia serta pengeluaran menggunakan skenario yang sama, serta menetapkan biaya tetap untuk pengelolaan organisasi. Jika sudah disepakati, maka bagian keuangan bisa membuat proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini berfungsi untuk memperhitungkan jadwal kegiatan dari masing-masing program.

### **Efektivitas Anggaran**

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang telah disediakan sebelumnya guna menghasilkan barang atau jasa. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian suatu target organisasi. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja suatu pemerintahan daerah. Pengukuran efektivitas perfokus pada

pencapaian atau hasil suatu organisasi pemerintahan daerah. Adapun kategori efektivitas menurut Mahmudi, dalam (Suprayoga, Saladin, & Jusmani, 2019) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas**

Kriteria Efektivitas	
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	< 60%

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yakni SAP yang diberikan judul, nomor, serta tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

#### 1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang Berlaku di Indonesia

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan disusun mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

#### 2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua yakni SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang serta ekuitas dan berbasis akrua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrua tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP No. 02

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan realisasi yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang sudah ditetapkan pada awal periode

pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran tersaji ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Unsur yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan didapatkan untuk mendanai kegiatan untuk periode mendatang (Fitra, 2019).

Pernyataan Standar ini diaplikasikan pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendapatkan anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Entitas pelaporan yang melaksanakan akuntansi dan penyajian laporan keuangannya berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi berupa realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, masing-masing realisasi tersebut dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Identifikasi dalam Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan dan jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- b) Cakupan entitas pelaporan
- c) Periode yang dicakup
- d) Mata uang pelaporan
- e) Satuan angka yang digunakan

#### Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

**Tabel 2. Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Dan 20X0**

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-Lain PAD Yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	xxx	xxx	xx	xxx
8		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	xxx	xxx	xx	xxx

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
21	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
22					
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
29					
30	<b>BELANJA</b>				
31	<b>BELANJA OPERASI</b>				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
34	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39					
40	<b>BELANJA MODAL</b>				
41	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalan	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
47	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
48					
49	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
50	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
51	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
52	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
53					
54	<b>TRANSFER</b>				
55	<b>TRANSFER/BAGI HASILPENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
56	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
61	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
63					
64	<b>PEMBIAYAAN</b>				
65	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
66	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
79					
80	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Penerimaan Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
94					
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, dimana menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006, hal. 155).

Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan yang berupa data sekunder. Lokasi dan objek dari penelitian atau dijadikan sumber informasi penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019. Metode pengumpulan data menggunakan teknik diantaranya: (1) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi; dan (2) Pengamatan.

Teknis analisis data merupakan proses pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif yang kemudian diterjemahkan dengan upaya dan teknik tertentu yang bekerja berdasarkan organisasi data, mengelompokkan menjadi terintegrasi agar dapat diolah lebih lanjut, mengambil intisarinnya, mencari dan menemukan pola menjadi penting untuk dipelajari serta menyimpulkan hal-hal apa saja yang dapat diinterpretasikan kepada pihak lain (Bogdan, 1982; Moleong, 2014). Data yang dihasilkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan dan diidentifikasi untuk dianalisis dalam rangka memperoleh kesimpulan yg benar sesuai dengan permasalahan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Hasil Tinjauan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Bogor

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan realisasi yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya selama periode tertentu. Berikut merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang berisi Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019:

**Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Periode : 01 Januari 2019 S/D 31 Desember 2019**

SATKER : DINAS PERTANIAN

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi s/d 31 Desember 2019	%	Realisasi 31 Desember 2018
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>529.078.000</b>	<b>565.358.140</b>	<b>106,86</b>	<b>623.641.400</b>
412	Pendapatan Retribusi Daerah	529.078.000	565.358.140	106,86	623.641.400
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>529.078.000</b>	<b>565.358.140</b>	<b>106,86</b>	<b>623.641.400</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.067.496.174</b>	<b>15.352.447.613</b>	<b>95,55</b>	<b>13.110.199.410</b>
511	Belanja Pegawai	13.447.477.174	12.869.141.181	95,69	9.276.641.122
512	Belanja Barang	2.620.019.000	2.484.306.432	94,82	3.833.558.288
515	Hibah	0	0	0,00	0
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.313.200</b>	<b>143.312.575</b>	<b>95,98</b>	<b>427.234.800</b>
522	Belanja Peralatan dan Mesin	149.313.200	143.312.575	95,98	427.234.800
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>16.216.809.374</b>	<b>15.495.760.188</b>	<b>95,55</b>	<b>13.537.434.210</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN</b>	<b>16.216.809.374</b>	<b>15.495.760.188</b>	<b>95,55</b>	<b>13.537.434.210</b>

	<b>TRANSFER</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15.687.731.374)</b>	<b>(14.930.402.048)</b>	<b>95,17</b>	<b>(12.913.792.810)</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran pendapatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.529.078.000,- Anggaran tersebut estimasi dari pendapatan retribusi daerah yaitu retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebesar Rp.38.358.000,- dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong sebesar Rp.490.720.000,-. Sedangkan untuk anggaran belanja diestimasikan sebesar Rp.16.216.809.374,- yang terdiri dari estimasi belanja operasi sebesar Rp.16.067.496.174,- dengan rincian estimasi belanja pegawai sebesar Rp.13.447.477.174,- belanja pegawai ini merupakan estimasi dari pengeluaran anggaran untuk kegiatan belanja gaji, tunjangan dan lain-lain. Estimasi belanja barang sebesar Rp.2.620.019.000,- belanja barang dan jasa ini merupakan estimasi untuk anggaran kegiatan belanja operasional maupun belanja non-operasional. Estimasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.149.313.200,-.

Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp.565.358.140,- dengan rincian realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebesar Rp.47.489.500,- dan realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong sebesar Rp.517.868.640,-. Realisasi belanja sebesar Rp.15.495.760.188,- dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp.15.352.447.613,- mencakup realisasi belanja pegawai sebesar Rp.12.869.141.181,- dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.484.306.432,-. Realisasi belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.143.312.575.

## 2. Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

Berikut ini merupakan kriteria efektivitas dari Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor pada Tahun 2019:

**Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019**

No	Keterangan	Pendapatan	Belanja
1	Anggaran	Rp.529.078.000	Rp.16.216.809.374
2	Realisasi	Rp.565.358.140	Rp.15.495.760.188
3	Selisih	Rp.36.280.140	Rp.721.049.186
4	Persentase	106,86%	95,55%
5	Tingkat Efektif	Sangat Efektif	Efektif

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan didapatkan dari pendapatan retribusi daerah yang terdiri dari retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan retribusi pemeriksaan hewan setelah dipotong. Anggaran belanja digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja yang paling banyak melakukan pengeluaran adalah belanja peralatan dan mesin, karena Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor banyak melakukan pengadaan di bidang belanja modal tujuannya yaitu menambah aset. Setelah melihat tingkat keefektifan realisasi anggaran, dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogordapat melaksanakan programnya dan menggunakan anggarannya dengan sangat baik.

### 3. Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Berdasarkan PSAP No. 02

Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor disusun menggunakan basis kas yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Daerah atau dikeluarkannya dari Kasda. Sedangkan untuk penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor disajikan berdasarkan basis akrual yakni pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkannya dari Kas Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor berbasis Kas Menuju Akrual.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

#### a) Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 5. Perbandingan Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Unsur LRA	PSAP No. 02	DKPP	Keterangan
Pendapatan	Dicantumkan	Dicantumkan	-
Belanja	Dicantumkan	Dicantumkan	-
Transfer	Dicantumkan	Dicantumkan	-
Surplus/Defisit	Dicantumkan	Dicantumkan	-
Pembiayaan	Dicantumkan	Tidak Dicantumkan	Tidak ada transaksi
SiLPA/SiKPA	Dicantumkan	Tidak Dicantumkan	Tidak ada transaksi

#### b) Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya disajikan satu kali dalam satu tahun. Sedangkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Laporan Realisasi Anggaran disajikan dua kali dalam satu tahun.

#### c) Tepat Waktu

Laporan Realisasi Anggaran dapat berkurang manfaatnya jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya disajikan oleh entitas pelapor 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

selalu mengedepankan ketepatan waktu dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggarannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **d) Isi Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas beberapa unsur, yakni:

- (1) Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode pelaporan. Pendapatan tersebut diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yakni dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan pendapatan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya.
- (2) Belanja merupakan semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi pembendaharaan. Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh PPKD. Belanja disajikan di muka laporan keuangan disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan belanja disajikan berdasarkan klasifikasi organisasi dan fungsi.
- (3) Transfer, pada Standar Akuntansi Pemerintah unsur LRA yakni transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor transfer keluar hampir sama dengan PSAP namun yang membedakan adalah metodenya. Transfer keluar dilaksanakan dengan cara penyetoran langsung ke bank oleh pelapor entitas dan menyetorkan uang ke entitas pelapor lainnya.
- (4) Surplus/Defisit, pada Standar Akuntansi Pemerintah Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dan dicatat pada pos Surplus/Defisit. Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor terdapat rincian Defisit yang merupakan selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (5) Pembiayaan, pada Standar Akuntansi Pemerintahan pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik pembiayaan penerimaan maupun pembiayaan pengeluaran. Pembiayaan tersebut perlu dibayar atau terima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran. Pada

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pos pembiayaan karena tidak adanya transaksi.

- (6) Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), pada Standar Akuntansi Pemerintah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pos SiLPA/SiKPA karena tidak adanya transaksi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan penelitian ini, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang terdiri atas pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tersebut dinilai telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor penyajian Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas.
2. Pendapatan yang terealisasi pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar 106,86% hal tersebut dapat dikatakan sangat efektif karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dapat melaksanakan programnya dengan sangat baik sehingga realisasi pendapatan melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Belanja pun dapat dikatakan efektif karena tidak melebihi batas anggaran yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari belanja yang terealisasi sebesar 95,55%.
3. Perbedaan yang terdapat dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan PSAP No. 02 dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah tidak adanya pos pembiayaan dan SiLPA/SiKPA karena tidak adanya transaksi yang berkaitan dengan pos tersebut.

Saran dari penelitian ini mencakup:

1. Selalu ada perubahan dan pembaharuan peraturan khususnya mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor harus selalu kooperatif dan responsif agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dalam penerapan suatu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu dilakukan pelatihan/sosialisasi, guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan khususnya staf keuangan supaya penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Rutin dilakukan pencocokan data secara berkala agar mengurangi kekeliruan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

4. Sebaiknya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor lebih transparan kepada masyarakat khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja dengan memanfaatkan fasilitas *website* yang sudah dimiliki sebagai sarana interaksi dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (3<sup>th</sup> Ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik*. (S. Sartika, & M. Tanzil, Eds.) Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Bogdan, R. C. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
- Darya, I. P. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. (C. Gunawan, Eds.) Malang: CV IRDH.
- Hariyani, D. S. (2018). *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Husain, T., & Wahyudi, R. (2020). Perantara Kualitas Audit: Rasio Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Advance: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-14.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 37-78.
- Khusuma, A. (2017). *Siklus dan Tahapan Pengelolaan Anggaran*. Retrieved Juli 17, 2021, from <http://www.integrasi-edukasi.org/siklus-dan-tahapan-pengelolaan-anggaran/>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. (Mutmainnah, Eds.) Gowa: Berkah Utami.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi Ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- PP RI NO.24 TH.2005. (2007). *SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. (2018, Agustus). *LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)*. Retrieved 2020, from [ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/berita/detail/laporan-realisasi-anggaran-lra](http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/berita/detail/laporan-realisasi-anggaran-lra)
- Setyawati, V., & Ferdinand, D. Y. (2019). *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC).
- Suprayoga, M. I., Saladin, H., & Jusmani. (2019). Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. *Jurnal Mediasi*, 2(2), 12-23.
- Wirartha, I. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. (D. Hardjono, Eds.) Jakarta: ANDI.